

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Ilmu Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan didisiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial merupakan studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompokkelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

Masalah sosial yang terjadi pada penyandang disabilitas pada penelitian ini adalah salah satu hambatan atau kendala yang harus memiliki sifat solutif, setidaknya ada fasilitas – fasilitas yang memadai bagi mereka serta hak untuk bisa berpartisipasi dalam masyarakatnya dapat terpenuhi. Untuk itu, kesejahteraan sosial memiliki tujuan dan konsep yang memang sudah di atur sedemikian rupa.

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di amerika serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan public yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar

ilmu social mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Masalah sosial yang terjadi pada penyandang disabilitas ini adalah salah satu hambatan atau kendala yang harus memiliki sifat solutif, setidaknya ada fasilitas – fasilitas yang memadai bagi mereka serta hak untuk bisa berpartisipasi dalam masyarakatnya dapat terpenuhi. Menurut W.A Friedlander yang dikutip oleh (Fahrudin, 2014:9) mengembangkan tentang pengertian kesejahteraan sosial, yaitu:

“Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang sudah terstruktur dari bentuk pelayanan sosial dan lembaga yang memiliki tujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam mencapai standar hidupnya, untuk mencapai standar kesejahteraan yang memuaskan dan relasi sosial individu yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat.”

Pengertian diatas merupakan salah satu tujuan kesejahteraan sosial itu ada, dan ini menjadi tanggung jawab bagi para pekerja sosial dalam memenuhi hak individu untuk mencapai kehidupan yang layak. Kesejahteraan sosial merupakan unsur terpenting dalam kegiatan meningkatkan taraf hidup individu, oleh karena

itu diperlukan sistem teknis yang lebih teratur agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ada.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan) dapat terlihat dari Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1:

“Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”

Berdasarkan definisi tersebut dipahami bahwa ilmu kesejahteraan sosial mengacu pada keadaan, usaha, serta pelayanan yang secara nyata untuk memenuhi kebutuhan individu. Individu yang berfungsi secara sosial tentunya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha usaha yang dilakukannya dalam mencapai pemenuhan kehidupan tersebut. Individu atau kelompok yang berfungsi secara sosial bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya saja, tetapi juga mampu memecahkan dan menghadapi masalah sosial yang ada.

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut (Fahrudin, 2014:10) Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan , pangan, kesehatan, dan relasirelasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-

sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Schneiderman (1972) dalam buku Fahrudin (2014:10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan system, pengawasan system, dan perubahan system.

a) Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan system kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

b) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-

fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

2.1.3. Fungsi – fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan socio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial menurut (Fahrudin, 2014:12) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan (preventive) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (Curative) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (Development) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses

pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (Support) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Melihat kutipan di atas bahwa adanya fungsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu atau proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosial-ekonomi.

2.1.4. Bidang – Bidang Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan merupakan proses penguatan di mana individu berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya sendiri. Pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila individu itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa Inggris: beneficiaries) atau objek saja.

Bila pada contoh-contoh di atas di gambarkan tentang bidang-bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, maka berikut adalah taksonomi bidang-bidang kesejahteraan sosial lebih difokuskan dalam arti luas menurut (Adi, 2013):

Bidang kesejahteraan sosial dilihat berdasarkan besaran kelompok sasaran;

- 1) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan individual

- 2) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan keluarga
- 3) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan kelompok
- 4) Bidang yang terkait dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal (komunitas lokal)
- 5) Bidang yang terkait dengan pengembangan kesejahteraan publik secara luas

Bidang kesejahteraan sosial dilihat berdasarkan tingkat usia kelompok sasaran;

- 1) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan anak dan remaja
- 2) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan generasi muda
- 3) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan lansia (manusia lanjut usia)

Bidang kesejahteraan sosial dilihat berdasarkan kekhususan masalah yang ditangani;

- 1) Bidang yang terkait dengan lembaga koreksional
- 2) Bidang yang terkait dengan lembaga kesehatan mental
- 3) Bidang yang terkait dengan lembaga pelayanan medik
- 4) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani kecacatan
- 5) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani kasus HIV/AIDS
- 6) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani masalah prostitusi
- 7) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani masalah perdagangan anak dan perempuan

- 8) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani gelandangan dan pengemis
- 9) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani masalah migrasi dan kebencanaan
- 10) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani masalah pengentasan kemiskinan

Bidang kesejahteraan sosial dilihat berdasarkan sektor-sektor pembangunan.

- 1) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor pendidikan
- 2) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor kesehatan
- 3) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor kesejahteraan sosial dalam arti sempit (di Indonesia terkait dengan kewenangan Kementrian Sosial)
- 4) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- 5) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor perumahan
- 6) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor ketenagakerjaan
- 7) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian
- 8) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan
- 9) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor industri
- 10) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor hukum dan HAM
- 11) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor agama

Bidang-bidang di atas, pada hakikatnya hadir dari pengembangan para ahli guna meningkatkan kondisi kualitas hidup individu yang sudah ada, dalam artian pengembangan bidang di atas ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama individu.

Dalam bidang-bidang kesejahteraan sosial ini dapat menjadi fokus utama korporat maupun pemerintah dalam menjalankan sistem kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya bidang-bidang yang dibentuk akan menjadikan fokus sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat mempengaruhi adanya proses pemberdayaan masyarakat nantinya.

2.1.5. Pengertian Pekerjaan Sosial

Dalam proses pemberdayaan tentunya perlu keahlian dalam menjalankannya. Maka dari pada itu terdapat suatu bidang pekerjaan yang memang berkompeten dalam bidang kesejahteraan sosial yaitu Pekerjaan Sosial.

Profesi pekerja sosial dilandaskan ilmu pengetahuan kesejahteraan sosial dan juga memiliki tujuan untuk menolong individu, kelompok, atau komunitas. Pekerja sosial memberi pertolongan seseorang hingga mampu menjalankan keberfungsian sosialnya. Adapun pengertian pekerja sosial adalah sebagai berikut.

”pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas masyarakat agar berfungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif guna terwujud suatu tujuan.” (Suharto, 2009 dalam Husna, 2014))

Dari definisi tersebut pekerja sosial merupakan profesi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial dimana dalam pelaksanaannya pekerja sosial melakukan upaya penanganan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial baik

individu, kelompok, ataupun komunitas dengan menggunakan metode-metode pekerja sosial.

Pekerjaan sosial merupakan bidang pekerjaan yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sosialnya dan memiliki peran penting dalam membantu individu, kelompok, serta masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Melalui penelitian dan inovasi praktik, pekerjaan sosial dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2.1.6. Unsur – Unsur Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya yaitu intervensi sosial pada individu, kelompok, dan masyarakat memiliki tiga pilar utama yaitu: body of knowledge, body of skills, dan code of ethics. Ketiga pilar tersebut menjelaskan dimana unsur pekerja sosial dilakukan berdasarkan pengetahuan, menguasai keterampilan pada saat melakukan praktik pekerjaan sosial, dan selalu berpedoman kepada nilai kode etik pekerjaan sosial. Fahrudin, 2018 menjelaskan unsur yang harus ada dalam praktik pekerjaan sosial sebagai berikut:

“Praktik pekerja sosial akan mempelajari pengetahuan, nilai serta etika, metode dan Teknik pekerjaan sosial dari lembaga pendidikan tersebut. Setelah semua itu dipelajari dan dikuasai, maka dalam diri calon pekerja sosial ini akan terbentuk kemampuan melakukan analisis (dilandasi pengetahuan), sikap (dilandasi oleh metode dan Teknik yang telah dikuasai). Dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, serta dibimbing oleh nilai-nilai yang dianutnya, pekerja sosial menggunakan keterampilannya dalam membantu individu, kelompok, atau masyarakat.”

Unsur-unsur pekerjaan sosial meliputi assessment, perencanaan, intervensi, evaluasi, kolaborasi, advokasi, dan pendidikan. Dalam melaksanakan pekerjaan

sosial, pekerja sosial harus memperhatikan unsur-unsur tersebut agar dapat memberikan bantuan yang efektif dan efisien bagi individu, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Pekerjaan sosial dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam penanggulangan konflik pekerjaan-keluarga mendukung keberfungsian sosial

2.2. Konsep Pelayanan Sosial

Pemberdayaan anak disabilitas perlu mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang akan membina dan mendampingi anak penyandang disabilitas supaya potensi yang dimiliki oleh individu dapat dikembangkan. Tekanan telah berubah dari usaha sosial yang bersifat rehabilitasi kepada kaum penyandang disabilitas, usaha probasi dan usaha-usaha klinis kepada pendidikan.

Usaha-usaha tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan (skill) atau dengan mengurangi kesulitan dalam fungsionalitas pribadi, masyarakat dapat ditingkatkan kondisi kehidupannya. Pelayanan sosial kemudian berkembang dan mencakup kesehatan, pendidikan, perumahan, demikian juga program kesejahteraan masyarakat.

2.2.1. Pengertian Pelayanan Sosial

Adapun definisi mengenai pelayanan sosial menurut (Huraerah, 2011:45) adalah:

”Kegiatan terorganisir yang ditujukan untuk membantu warga Negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami bentuk kecacatan.”

Pelayanan sosial merupakan istilah yang tidak mudah dijelaskan, selain itu pengertian pelayanan sosial tidak sama untuk Negara yang berbeda. Di Inggris misalnya, istilah itu digunakan untuk pelayanan servis dan manfaat benefit yang berorientasi orang. Adapun menurut (Edi Suharto, 2017) yang mengembangkan konsep pelayanan sosial yaitu:

“Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, dan bahkan kriminalitas.”

Pelayanan sosial memiliki peran untuk mengatasi beberapa masalah sosial yang ada, salah satunya adalah masalah sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan adanya pelayanan sosial maka individu akan terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri individu tersebut. Apabila mengutip dari Romanyshyn (1971) yang dikutip oleh Fahrudin (2012:51) mendefinisikan pelayanan sosial adalah :

“Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluargakeluarga melalui 1.Sumber-sumber sosial pendukung, dan 2. Proses-proses meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.”

Melihat definisi di atas bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keberfungsian sosial seseorang agar kembali seperti biasanya dan memperbaiki kualitas kehidupan dengan sumber pendukung yang memadai. Maka jelas pelayanan sosial dibutuhkan seiring

modernisasi dewasa kini agar mampu membantu orang yang memiliki permasalahan sosial.

2.2.2. Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Perkembangan pelayanan sosial yang sangat cepat, motivasi yang beraneka ragam, diantara para penyusunnya dan besarnya beban kasus maupun tenaga yang terlibat di dalamnya menyebabkan perlunya menggunakan pelayanan. Pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Menurut Fahrudin (2012:54) menjelaskan tentang fungsi-fungsi pelayanan sosial adalah :

1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga mereka dapat berkembang dan mereka bisa mendapatkan sebuah perlindungan. Selain itu dengan adanya pelayanan sosial masyarakat bisa mendapatkan akses, informasi dan nasihat yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakantindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

2.3. Konsep Usaha Usaha Kesejahteraan Sosial

Jika masalah sosial yang ada tidak dapat teratasi maka akan terjadinya masalah sosial yang cukup kompleks. Bahkan dengan tidak adanya tindakan ini tingkat perpecahan antara masyarakat akan meningkat, disisi lain aspek kesejahteraan pun akan pudar. Disini peneliti dapat simpulkan bahwa tidak adanya pelayanan sosial maka masalah sosial tidak akan terus bisa diatasi.

Maka, daripada itu adapun Usaha usaha Kesejahteraan Sosial yang meliputi tindakan untuk mengatasi masalah sosial melalui pelayanan sosial menurut (Suharto, 2005):

“kegiatan terorganisir untuk meningkatkan kondisi orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Sosial dan sejumlah besar organisasi-organisasi non pemerintah telah memainkan peranan penting dalam bidang pelayanan sosial. Untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial yang dikenal sebagai usaha kesejahteraan sosial.”

Dengan demikian pelayanan sosial merupakan bentuk dari tindakan usaha kesejahteraan sosial dan hal ini tentu tidak hanya menolong orang – orang terpilih, bahkan orang yang memiliki masalah sosial seminim apapun akan ditangani. Bahkan keterlibatan pemerintah pun hadir didalamnya, dengan adanya lembaga sosial dibawah naungan kementerian turut hadir memberikan peranan besar bagi orang orang yang memiliki kebermasalahan sosialnya. Dengan begitu untuk melakukan kegiatan menangani masalah sosial tersebut dikenal sebagai usaha kesejahteraan sosial.

2.3.1. Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu program-program dan kegiatan yang berpusat pada tujuan kesejahteraan sosial yang meliputi semua upaya,

program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial merupakan sebuah rutinitas upaya pengembangan sumber-sumber daya dalam menumbuhkan, membina, dan meningkatkan terwujudnya kesejahteraan sosial serta menunjang usaha-usaha lain yang mempunyai tujuan yang sama.

Menurut Cassidy yang dikutip Fahrudin (2012:15) mengatakan:

”Sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalisasi, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.”

Menurut pengertian di atas usaha kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan terorganisasi dan merupakan kegiatan yang kongkrit untuk menjawab masalah-masalah kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat ditunjukkan pada individu, kelompok, dan masyarakat.

Salah satu contoh UKS adalah kebijakan Rencana Pembangunan Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perencanaan dan penataan yang jelas. UKS juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan anak panti asuhan, dengan memberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.

Selain itu, UKS juga dapat dilakukan melalui pengelolaan rumah singgah untuk penyandang disabilitas atau penderita gangguan jiwa, dengan memberikan pelayanan kesehatan jiwa komunitas.

2.3.2. Tujuan Usaha – Usaha Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang diharapkan oleh masyarakat apabila usaha kesejahteraan sosial bisa berjalan dengan baik oleh pihak pemerintah, organisasi non pemerintah, maupun dunia usaha. Karena usaha kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh organisasi yang menyediakan usaha kesejahteraan tersebut. Menurut Mendoza yang dikutip Fahrudin (2012:16) menyatakan tiga tujuan dari usaha kesejahteraan sosial yaitu:

1. Tujuan Kemanusiaan dan Keadilan Sosial (Humanitarian and Social Justice Goal). Tujuan ini, bersumber dari gagasan ideal demokratis tentang keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi diri yang mereka miliki. Meskipun kadangkala potensi tersebut tertutup oleh adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, kejiwaan ataupun berbagai faktor lainnya. Berdasarkan tujuan ini, usaha kesejahteraan sosial banyak dilahirkan pada upaya pengidentifikasian kelompok yang paling tidak mendapat perhatian; kelompok yang paling diterlantarkan; kelompok yang paling tergantung terhadap pihak lain ataupun kelompok yang kurang diuntungkan. Usaha kesejahteraan sosial menjadikan mereka sebagai kelompok sasaran dalam upaya menjembatani kelangkaan sumber daya kelompok sasaran miliki.
2. Tujuan yang terkait dengan Pengendalian Sosial (Social Control Goal) Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, akan melakukan “serangan” ataupun menjadi “ancaman” bagi

kelompok masyarakat yang sudah mapan. Karena itu, kelompok masyarakat yang sudah mapan berupaya “mengamankan” diri mereka dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, pemikiran maupun stabilitas yang sudah berjalan, misalnya saja perusahaan multi nasional yang mengalokasikan sebagian kecil dari anggarannya untuk memberikan bantuan keuangan pada masyarakat sekitar lokasi, agar mereka tidak melakukan perusakan pada property yang dimiliki perusahaan ataupun melakukan pembelokiran jalan ke arah lahan pertambangan.

3. Tujuan yang terkait dengan Pembangunan Ekonomi (Ekonomi Development Goal) Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produktifitas barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi. Beberapa contohnya usaha kesejahteraan sosial yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah:
 - a. Beberapa tipe usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktifitas individu, kelompok ataupun masyarakat. Seperti usaha kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan konseling pada pekerja di sektor industri, usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pelatihan bagi mereka yang masih atau sedang mengagur, dan sebagainya.
 - b. Usaha kesejahteraan sosial yang berupaya untuk mencegah dan meminimalisir hambatan “beban” akibat adanya “tanggungan” dari

pada pekerja dewasa. “tanggungan” (dependent) di sini bisa saja anggota keluarga yang mengalami kecacatan, dan sebagainya. Usaha kesejahteraan sosial yang dikembangkan dalam kaitan dengan hal ini bisa saja berupa, tempat penitipan anak; panti werdha, pusat rehabilitasi, dan sebagainya.

- c. Usaha kesejahteraan sosial yang mencegah atau “melawan” pengaruh buruk dari urbanisasi dan industrilisasi terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, serta membantu mengidentifikasi dan mengembangkan kepemimpinan, lokal dan komunitas. Misalnya, program latihan kepemimpinan, program pendidikan kehidupan berkeluarga dan sebagainya.

2.3.3. Jenis – Jenis Usaha Kesejahteraan Sosial

Dalam Fahrudin (2012:18) menjelaskan tentang jenis usaha kesejahteraan sosial yang ditawarkan ke masyarakat dapat berupa:

- a. Layanan yang langsung ditunjukkan ke kelompok/komunitas sasaran yang dikenal dengan nama Direct Service. Misalnya saja, suatu lembaga pelayanan masyarakat mengembangkan program pengembangan modal usaha dan berbagai macam model pemberian bantuan keaunagan untuk komunitas (income generating activities), program bea siswa untuk anak yang tidak mampu dan sebagainya. Di sini semua layanan yang dilakukan oleh lembaga ditunjukkan langsung pada komunitas sasaran.
- b. Layanan yang tidak langsung diarahkan pada komunitas sasaran, tetapi bantuan diberikan pada lembaga yang mempunyai program langsung ke

komunitas sasaran. Bentuk layanan ini dikenal dengan *Indirect Services*, misalnya suatu lembaga donor internasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) maka lembaga tersebut mengontak berbagai organisasi pelayanan masyarakat (*human service organization*)

Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa suatu usaha kesejahteraan sosial diajukan oleh suatu organisasi pelayanan sosial masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat. Dalam melakukan perubahan di masyarakat, organisasi pelayanan masyarakat dapat melakukannya secara langsung ke komunitas sasaran ataupun melakukan secara tidak langsung ke komunitas sasaran. Dalam upaya memberikan pelayanan langsung ke komunitas sasaran tersebut, berbagai organisasi pelayanan masyarakat menggunakan tenaga profesi pekerja sosial sebagai yang utama di dalamnya.

2.4. Konsep Masalah Sosial

Menurut (Suharto, 2005) menjelaskan bahwa para sosiolog biasanya memandang masalah sosial sebagai situasi tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian besar orang yang setuju bahwa tindakan harus dilakukan untuk mengubah situasi itu. Para pekerja sosial seringkali mendefinisikan masalah sosial sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan peranan-peranannya di masyarakat.

Masalah sosial juga merupakan adanya ketidak seimbangan unsur antara sosial dan budaya masyarakat sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sosial individu dan membahayakan kelompok sosial lainnya, sehingga terjadinya kerenggangan ikatan sosial antara individu dengan individu lain maupun lingkungan sekitarnya.

Permasalahan sosial dibedakan menjadi dua macam yaitu antara masalah masyarakat (scientific or societal problems) dengan problema sosial (ameliorative or social problems). Yang pertama tentang menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat. Sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Pada dasarnya, masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral.

Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Sebab itu masalah-masalah sosial tak akan mungkin tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. (Soekanto, 1990:401)

2.4.1. Pengertian Masalah Sosial

Secara luas, masalah sosial sangatlah sederhana untuk diartikan. Menurut Janssen (1992:42) yang dikutip oleh Suharto (2005:83), masalah sosial secara umum didefinisikan sebagai berikut:

“perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya.”

Dalam hal ini, masalah difokuskan kepada masalah sosial. Menurut Horton dan Leslie dalam Suharto (2005:82) mendefinisikan masalah sosial sebagai berikut:

“suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif.”

Dari definisi tersebut, bisa disimpulkan oleh peneliti bahwa masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kasus kriminalitas akhir-akhir ini sangat ramai diberitakan di koran maupun televisi. Kriminalitas adalah masalah sosial.
2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonism, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu

tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran “baik” atau “buruk” sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Penggunaan narkoba, minuman keras, homoseksual, bahkan bunu diri adalah masalah sosial, apabila ilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertetangan dengan aturanaturan umum. Tetapi pada masyarakat yang memandang penggunaan minuman keras, misalnya sebagai sesuatu yang “wajar” dan “biasa”, penggunaan whisky, jhony walker atau sampagne bukanlah masalah sosial, meskipun dilakukan banyak orang.

3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat sakit kepala. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksis sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.
5. Stigma dan Diskriminasi: Penyandang disabilitas sering menghadapi stigma sosial dan diskriminasi. Mereka mungkin dianggap sebagai beban

atau diabaikan dalam masyarakat, terutama jika mereka memiliki disabilitas yang terlihat atau memerlukan perawatan khusus.

2.5. Konsep Pemberdayaan

2.5.1. Pengertian Pemberdayaan

Upaya – upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas ataupun individu, untuk meningkatkan perbaikan kualitas hidup dan perbaikan kesejahteraan maka bisa dibilang dalam pengertian sehari hari disebut pemberdayaan. Adapun pemberdayaan menurut Buku Model Pemberdayaan yang ditulis oleh (Safyuddin et al., 2017) halaman 1 menyebutkan bahwa:

“Pemberdayaan berasal dari kata ‘daya’, yang berarti kekuatan atau ‘kemampuan’, yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan ‘Power’. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau empowerment, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah.”

Pemberdayaan disini memiliki arti sebagai usaha dalam meningkatkan kemampuan seseorang berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki oleh individu, dalam bukunya pun menjelaskan bahwa Menurut (A.M.W. Pranarka; Onny S. Prijono; A.M.W. Pranarka., 1996) pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya.

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok

serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial (Soeharto, 2008).

Adapun pengertian pemberdayaan menurut (Susilawati, n.d.) yaitu:

“Pemberdayaan diambil dari sebuah terjemah kata dalam bahasa Inggris, yakni empowerment, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, ‘daya’ bermakna kekuatan (power). Bryant dan White menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin, dengan cara menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh.”

Pemberdayaan diatas merupakan bentuk usaha sosial, yang dimana pemberdayaan bertujuan untuk menumbuhkan sumber daya yang ada dengan cara memperoleh keterampilan, kekuasaan, dan pengetahuan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain disekitarnya. Dari sini peneliti memiliki pendapat bahwa pemberdayaan secara praktis memang ditujukan untuk meningkatkan orang yang lemah dan tidak beruntung agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan dalam mencapai penguatan diri guna merahi keinginan yang dicapai. Pemberdayaan akan melahirkan kemandirian, baik kemandirian berfikir, sikap, dan tindakan yang bermuara pada pencapaian harapan hidup yang lebih baik.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a)

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Robinson (1994) yang dikutip oleh Ania Maharani di dalam artikelnya menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial. Suatu pembebas Menurut Payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (Empowerment), pada intinya ditunjukkan guna:

“Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya ingat yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya”.

Pendapat Payne di atas mengemukakan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui transfer daya guna mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Menurut Shardlow, pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. an kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dari semua definisi pemberdayaan jika diperhatikan memang terdapat perbedaan, tetapi mengandung arti yang sama. Oleh karena itu peneliti mencoba menyimpulkan mengenai batasan definisi pemberdayaan berdasarkan informasi di atas sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan adalah mengembangkan dari keadaan tidak berdaya menjadi berdaya.
- b. Pemberdayaan adalah usaha mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- c. Pemberdayaan bisa diartikan mengarah ke arah yang lebih baik atau lebih meningkat.
- d. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah.

2.5.2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut (Edi Suharto, 2005) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Menurut Ife, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung.

Adapun tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal, dan kaum kecil, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminir/ dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Sedangkan menurut (Agus Ahmad Syafi'i, 2001) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat atau memberdayakan kemampuan untuk memajukan diri kearah yang lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat adalah

upaya memperluas pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

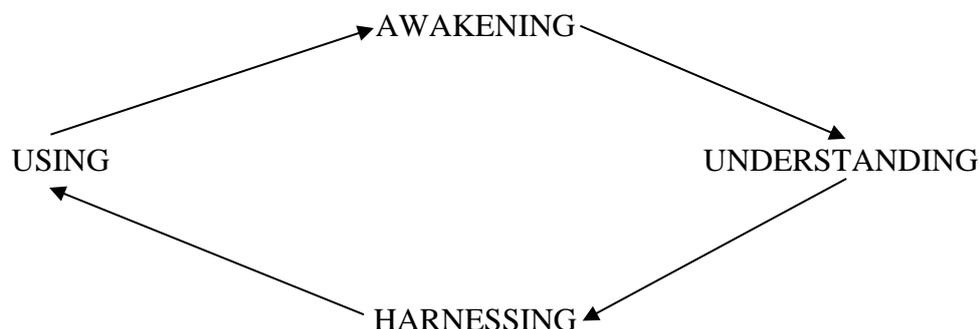
Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Dimana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

2.5.3. Tahap Pemberdayaan

Proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh (A.M.W. Pranarka; Onny S. Priyono; A.M.W. Pranarka., 1996) mengandung dua kecenderungan yaitu:

- a. Kecenderungan primer, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
- b. Kecenderungan sekunder, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau berdaya untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan dan tidak hanya terpaku pada satu program saja.³³ Menurut Wilson yang dikutip oleh Nyoman Sumaryadi, proses pemberdayaan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1: *Empowerment Process (Taken from Wilson, 1996:136)*

Dari gambar di atas menjelaskan pada tahap pertama dari proses pemberdayaan individu adalah “*awakening*”, yang membantu orang mengadakan penelitian terhadap situasi mereka saat ini, pekerjaan dan posisi mereka dalam organisasi. Mereka menilai kemajuan pekerjaan atau karir mereka terhadap rencana atau harapan mereka. Lebih jauh, mereka menilai dan menggambarkan kemampuan, sikap dan keterampilan mereka untuk menentukan apakah mereka secara efektif dimanfaatkan. *Awakening* menggerakkan orang ke dalam a state of readiness untuk menerima tantangan pemberdayaan.

Tahap kedua dari proses pemberdayaan individu adalah “*understanding*”. Orang mendapatkan pemahaman dan persepsi baru yang sudah mereka dapat mengenai diri mereka sendiri, pekerjaan mereka, aspirasi mereka dan keadaan umum. Proses pemahaman (*process of understanding*) meliputi belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan apa yang akan dituntut dari orang oleh organisasinya. Misalnya, proses mencari alasan mengapa mereka merasa cara mereka melakukan, dan kemudian mengembangkan suatu strategi atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah.

Tahap ketiga dari proses pemberdayaan adalah “*harnessing*”, yang diakibatkan oleh *awakening and understanding phases*. Individu yang sudah memperlihatkan keterampilan dan sifat, harus memutuskan bagaimana mereka dapat menggunakannya bagi pemberdayaan.

Tahap terakhir dari proses tersebut adalah menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan kerja setiap hari. Pemberdayaan tidak merupakan proyek tunggal dengan awal dan akhir. Ia adalah sebuah filosofi, suatu cara di mana orang berpikir dan melaksanakan. Penyesuaian dan pelaksanaannya memerlukan pembinaan organisasi dan proses pendidikan yang berkelanjutan selama bertahun-tahun.

Sedangkan menurut Hogan yang dikutip oleh (Adi Isbandi Rukminto, 2012), menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima (5) tahapan utama yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan. (*recall depowering/ empowering experiences*).
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/ empowerment*).
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problemfor project*).
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna (*identify useful power bases*).
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Dalam konteks kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan yang dikemukakan oleh Hogan di atas tentunya juga terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari satu tingkatan ke tingkat yang lebih baik. Tentunya dengan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan suatu komunitas menjadi kurang berdaya (*depowerment*).

2.6. Konsep Disabilitas

Penyandang Disabilitas merupakan manusia yang memiliki keterbatasan dalam hal fisik, mental, dan indra. Namun begitu penyandang disabilitas pun merupakan manusia seutuhnya. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama setara dengan orang lain.

2.6.1. Pengertian Disabilitas

Disabilitas adalah istilah payung, yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Disabilitas atau Cacat (bahasa Inggris: *disability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Adapun pengertian disabilitas menurut Goffman dalam jurnal (Kurniadi, Y U., 2020) menyatakan bahwa:

“Penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bias melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain”.

Penyandang disabilitas kerap disebut sebagai orang cacat oleh masyarakat yang tidak bisa produktif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dimana penyandang disabilitas memiliki keterbatasan – keterbatasan yang tidak dimiliki oleh manusia secara general. Dari uraian menurut Goffman mengungkapkan bahwa memang penyandang disabilitas selalu dianggap sebelah mata oleh masyarakat, sehingga muncul stigma buruk yang diberikan oleh orang lain. Adapun asumsi disabilitas menurut (Geminastiti Purinami et al., 2019) yang mengungkapkan bahwa:

“Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan. Penyandang disabilitas memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya. Penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran HAM”.

Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari masyarakat, yang memiliki arti bahwa penyandang disabilitas pun memiliki hak untuk bisa berpartisipasi dengan masyarakat umum. Tetapi hal ini selalu dipandang sebelah mata oleh khalayak umum karena memiliki perbedaan kondisi fisik. Anak-anak disabilitas biasanya hanya bergantung dengan keluarganya saja, karena atas ketidakpercayaan dirinya lah yang menjadi penyebab bahwa mereka sulit untuk menjalin relasi sosial dengan masyarakat umum.

Ada beberapa istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan anak berkebutuhan khusus, seperti difabel dan disabilitas. Dalam hal ini difabel merupakan sebutan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan kata lain

difabel merupakan sebutan bagi orang yang sedang mengalami disabilitas. Difabel sebenarnya merupakan kependekan dari *difference ability*. (Atmaja, 2017)

2.6.2. Disabilitas Tuna Daksa

Anak penyandang disabilitas memang banyak jenisnya dan beragam keterbatasan – keterbatasan yang mereka miliki, maka ada pengelompokan jenis penyandang disabilitas itu sendiri diantaranya disabilitas kelainan fisik, mental, dan perilaku sosial. Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan kepada anak penyandang disabilitas tuna daksa saja, adapun pengertian tuna daksa menurut (Atmaja, 2017) dalam bukunya Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus halaman 127, yaitu:

“Anak tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal, sebagai akibat bawaan, luka penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan secara khusus.”

Maka dari uraian permasalahan diatas perlu adanya pemberdayaan anak tuna daksa secara khusus, yang dimana individu akan diberi pelatihan berupa pengembangan potensi guna meningkatkan *skill* dan *softskill* individu sesuai dengan keadaannya. Hal ini dapat melewati beberapa usaha – usaha sosial berupa pembimbingan dari pekerja sosial yang terkait guna memantau perkembangan individu didalam lembaga tersebut.

2.6.3. Pemberdayaan Disabilitas

Dalam pemberdayaan, memang setiap manusia memiliki batasannya masing masing. Penyandang disabilitas harus memiliki pemberdayaannya tersendiri dan

memang diharuskan menjadi fokus individu penyandang disabilitas. Adapun asumsi tentang pemberdayaan disabilitas menurut (Susilawati, 2016) yaitu:

“Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu penyandang cacat dan juga kekuatan sosial, yakni masyarakatnya yang saling mendukung. Hal ini sejalan dengan pandangan Rappaport yang melihat kemandirian sebagai modal utama dalam pemberdayaan berbasis masyarakat ini, dan Mc Ardle yang memandang pemberdayaan dilakukan melalui kemandirian para penyandang cacat dalam rangka mencapai tujuan.”

Maka dari asumsi diatas tentu seluruh usaha ini perlu adanya keadilan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan disabilitas ini pun akan membangun dan meningkatkan kemampuan, rasa percaya diri, dan kemandirian penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kecacatannya, melalui kegiatan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu secara fungsional. Maka dari itu sangat penting sekali peran pemerintah dalam memberikan perhatian lebih guna kelangsungan hidup mereka dari Pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pemberdayaan disabilitas juga dapat dilakukan melalui dukungan sosial dan alat penunjang kepercayaan diri, seperti alat bantu penyandang cacat fisik. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan disabilitas adalah keterbatasan aksesibilitas, diskriminasi, kurangnya program pemberdayaan, keterbatasan sumber daya, dan stigma sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang terencana dan terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan.

Adanya keterlibatan masyarakat disini dapat menjadi sebuah indikator keberhasilan bagi pemberdayaan penyandang disabilitas. Dengan faktor

pendukung berupa bentuk pembangunan relasi sosial antara penyandang disabilitas dan masyarakat itu sendiri untuk hak penyandang disabilitas, yang dihadiri oleh instansi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperoleh paham yang sama mengenai pentingnya pemberdayaan disabilitas. Maka daripada itu peneliti ingin mengetahui bagaimana model pelayanan yang diberikan oleh SLBN Cinta Kasih kepada penyandang disabilitas untuk memberdayakan individu berupa program dan kegiatan pelatihan yang ada disana.

2.6.4. Keterampilan Kerajinan Tangan

1. Pengertian Keterampilan

Dalam konteks kerajinan tangan, “keterampilan” mengacu pada keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk membuat produk buatan tangan. Keterampilan ini dapat mencakup pengetahuan tentang berbagai bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan tangan seperti tenun, keramik, pertukangan, pandai besi, dan pencetakan desain tekstil.

Menurut W.Gulo beliau mengungkapkan dalam tulisannya bahwa keterampilan tidak mungkin berkembang apabila tidak didukung oleh sikap, kemauan dan pengetahuan. Manusia merupakan pribadi yang unik dimana aspek rihani, mental intelektual dan fisik merupakan satu kesatuan yang utuh.

Keterampilan sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia. The Liang Gie mengemukakan pengertian keterampilan sebagai berikut:

Keterampilan adalah kegiatan menguasai sesuatu keterampilan dengan tambahan bahwa mempelajari keterampilan harus dibarengi dengan kegiatan praktik, berlatih, dan mengulang-ulang suatu kerja. Seseorang yang memahami

semua asas, metode, pengetahuan dan teori dan mampu melaksanakan secara praktis adalah orang yang memiliki keterampilan.⁴⁹

Dengan memperhatikan konsep keterampilan menurut Liang Gie di atas dapat dikemukakan bahwa keterampilan merupakan suatu pemahaman seseorang akan suatu metode, cara, dan teknik, pengetahuan dan teori. Sehingga seseorang tersebut dapat mempraktikanya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam organisasi/ lembaga tertentu yang dapat menunjukkan kalau seseorang itu mempunyai keterampilan.

2. Kerajinan Tangan

Secara umum, pengertian kerajinan tangan adalah aktivitas yang melibatkan keterampilan tangan, sehingga menghasilkan suatu karya dalam bentuk barang yang memiliki nilai estetika dan kegunaan. Semakin rumit proses pengerjaan kerajinan tersebut, maka semakin tinggi kualitas serta nilai jualnya.

Kerajinan tangan umumnya menghasilkan suatu barang yang mempunyai fungsi dan unsur seni. Oleh sebab itulah, tidak mengherankan apabila kerajinan tangan juga sering dijadikan sebagai pajangan. Salah satu contoh kerajinan tangan yang mudah ditemukan adalah aksesoris kalung dari pernak pernik unik. Kerajinan tangan adalah produk yang dibuat secara manual dengan menggunakan keterampilan dan keahlian tangan.

Pengertian kerajinan menurut Kadjim, 2011 adalah Kerajinan merupakan usaha menciptakan suatu karya yang dilakukan dengan penuh semangat, kecekatan, ketekunan, dedikasi tinggi, kegigihan, dan berdaya maju luas secara terus menerus.

Kerajinan tangan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam membuat produk kerajinan tangan. Pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan kerajinan tangan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan jiwa kewirausahaan masyarakat.

Beberapa contoh kerajinan tangan yang populer di Indonesia antara lain anyaman, sulam, batik, ukir kayu, dan tenun. Kerajinan tangan juga dapat dijadikan sebagai produk wisata yang menarik bagi wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh khas daerah.

Dalam beberapa penelitian, kerajinan tangan juga dikaji dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika dan etnomatematika. Hasil kerajinan tangan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran yang kreatif dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

Fungsi dari kerajinan tangan memiliki beragam varian yaitu fungsi kegunaan, Kerajinan tangan memiliki nilai guna (pakai) dalam kehidupan manusia. Nilai guna tersebut bisa dalam bentuk barang dapat difungsikan sebagai sandang, membantu melakukan kegiatan sehari-hari, menunjang suatu aktivitas, dan sebagai kelengkapan dalam ritual keagamaan maupun budaya dan fungsi hias, Kerajinan tangan memprioritaskan nilai estetika (keindahan) tanpa memperhatikan kegunaan barang tersebut. Benda kerajinan tangan bernilai seni tinggi yang menarik perhatian antara lain adalah, patung.

Meskipun kerajinan tangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran produk

kerajinan tangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang pemasaran dan kurangnya akses pasar yang luas, Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan dalam pemasaran produk kerajinan tangan juga penting untuk membantu meningkatkan penjualan dan penghasilan masyarakat.

Kerajinan tangan yang dibuat oleh penyandang disabilitas seringkali merupakan produk-produk unik dan berharga yang mencerminkan bakat dan keterampilan mereka. Ini adalah cara yang baik untuk mendukung kemandirian ekonomi dan sosial mereka. Beberapa contoh kerajinan tangan yang sering dibuat oleh penyandang disabilitas meliputi:

Kerajinan Tekstil: Beberapa penyandang disabilitas memiliki keterampilan dalam membuat produk tekstil seperti kain tenun, sulam, dan anyaman. Mereka dapat membuat tas, selimut, baju, dan aksesoris lainnya.

Keramik dan Pottery: Mereka dapat menciptakan barang-barang keramik seperti vas, piring, dan hiasan dinding dengan berbagai teknik seperti pengerjaan lumpur dan glasir.

Kerajinan Kayu: Meskipun memerlukan keterampilan fisik yang baik, beberapa penyandang disabilitas mampu membuat kerajinan kayu seperti patung, perabotan kecil, dan mainan kayu.

Perhiasan: Pembuatan perhiasan adalah pilihan populer. Mereka dapat membuat gelang, kalung, anting-anting, dan cincin dengan berbagai bahan seperti manik-manik, logam, atau kain.

Kerajinan Kertas: Melibatkan teknik lipat, potong, dan hias, penyandang disabilitas dapat membuat kartu ucapan, bingkai foto, dan dekorasi kertas lainnya.

Kerajinan Anyaman: Mereka dapat membuat kerajinan anyaman seperti tas, topi, dan tikar dengan menggunakan berbagai jenis bahan seperti bambu, rotan, atau serat alami lainnya.

Lukisan dan Seni Visual: Penyandang disabilitas yang memiliki bakat seni visual dapat menciptakan lukisan, gambar, dan seni abstrak lainnya yang dapat dijual sebagai karya seni asli.

Kerajinan Logam: Beberapa di antara mereka memiliki kemampuan untuk membuat kerajinan logam seperti perhiasan, patung logam, atau hiasan dinding logam.

Kerajinan Lilin: Pembuatan lilin adalah pilihan lain yang populer. Mereka dapat membuat lilin hiasan, lilin wangi, atau lilin potong unik.

Kerajinan Kain: Pembuatan boneka kain, bantal, dan barang-barang dekoratif lainnya adalah pilihan yang baik untuk penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan menjahit.

Pasar untuk produk-produk kerajinan tangan yang dibuat oleh penyandang disabilitas terus berkembang, dan banyak organisasi dan program yang mendukung pemberdayaan mereka dalam dunia kerajinan tangan. Dengan membeli atau mendukung kerajinan tangan mereka, Anda dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas serta mengapresiasi kreativitas mereka.